

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi perhatian utama pembangunan nasional, tetapi juga pembangunan daerah. Tuntutan dan sekaligus tantangan pembangunan untuk menanggulangi kemiskinan di daerah bahkan menjadi semakin nyata. Kemiskinan lebih dari sekedar isu keadilan sosial (Sherraden, 2001:131). Kemiskinan merupakan kerugian sebuah negara, sebuah kehilangan sumber daya manusia. Ambil satu contoh saja, dalam hal keterlambatan pertumbuhan mental, dipastikan bahwa 75-90 persen dari individu yang pertumbuhan mentalnya terlambat mendapatkan cacat mental tersebut bukan dari gen atau kerusakan otak yang traumatis, tetapi lebih dikarenakan oleh faktor sosio-ekonomi. Penyebab utamanya adalah kekurangan gizi pada masa bayi baik sebelum maupun sesudah kelahiran, termasuk kekurangan nutrisi, adanya substansi berbahaya dan kekurangan ransangan (stimulasi).

Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana kekurangan harta atau benda berharga yang diderita oleh seseorang atau sekelompok orang. Akibat mereka kekurangan harta atau benda, maka seseorang atau sekelompok orang tersebut kurang mampu dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan hidup sebagaimana layaknya. Sebagian besar penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, garis kemiskinan adalah tingkatan pendapatan yang ditetapkan sebagai kecukupan dalam memenuhi pokok, seperti sandang, pangan dan papan. Menurut Suparlan kemiskinan adalah standar tingkat hidup yang rendah karena kekurangan materi

pada sejumlah atau golongan orang bila dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku di masyarakat sekitarnya. Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan yang memenuhi standar hidup (Nugroho, 1995). Kemiskinan sesungguhnya menjadi masalah yang sudah ada sejak lama. Bagi masyarakat miskin, kemiskinan ini menjadi sesuatu yang nyata bagi kehidupan mereka sehari-hari, karena mereka merasakan bagaimana susahnya memenuhi kebutuhan hidup mereka, seperti masalah keuangan. Disisi lain kemiskinan ini menciptakan krisis di tengah masyarakat Indonesia, hal ini dapat kita lihat krisis ekonomi yang diikuti dengan krisis moneter, sudah berlangsung sekian lama. Kemiskinan yang dialami oleh masyarakat Indonesia dalam waktu yang cukup lama, maka timbul sikap mental yang memperdalam keadaan kemiskinan masyarakat. Golongan yang dikategorikan miskin karena struktur sosial yaitu :

1. Kaum petani yang bukan memiliki lahan garapan atau hanya memiliki sedikit tanah sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Kelompok ini bekerja sebagai buruh tani, petani penggarap, atau petani penyewa lain.
2. Kaum buruh kasar yang tidak memiliki keahlian dan keterampilan karena tidak terlatih, tingkat pendidikannya rendah atau bahkan sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan.

Setiap manusia dengan kemampuan akal atau budaya telah mengembangkan berbagai macam sistem tindakan demi keperluan hidupnya, sehingga ia menjadi

mahluk yang paling berkuasa di muka bumi (Koentjaraningrat dalam Rinaldo, 2016:3).

Masalah kemiskinan ini memberikan dampak besar terhadap aspek seperti pendidikan, keamanan, politik, dan sebagainya, maka dari itu banyak program pemberdayaan masyarakat miskin diluncurkan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Program pengentasan kemiskinan diyakini dapat meningkatkan taraf hidup dan menumbuhkan kemandirian masyarakat adalah program yang bersifat pemberdayaan. Namun program tersebut tidak menjamin untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi. Di dalam pengembangan kemiskinan yang terjadi pasti adanya pola kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat miskin untuk memenuhi kehidupan seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Data badan pusat statistik sebelum krisis ekonomi memperlihatkan tingkat penurunan jumlah penduduk miskin Indonesia yang cukup drastis, tinggal sekitar 20 juta orang. Dalam pidato Presiden RI tahun 2019 kemiskinan RI turun hingga 1,81 persen dari yang awalnya berada di angka 11,22 persen (Maret 2015) menjadi 9,41 persen (Maret 2019). Selain itu ketimpangan pendapatan ikut turun, ditandai dengan rasio gini yang semakin rendah. Rasio gini Indonesia berada diangka 0,408 (Maret 2015), kemudian turun menjadi 0,382 Maret (2019). Dengan begitu pertumbuhan ekonomi Indonesia naik dari 4,88 persen (tahun 2015) menjadi 5,17 persen (tahun 2018).

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 ada 26.93 jiwa di Kabupaten Limapuluh Kota. Dibandingkan dengan tahun 2016 ada penurunan penduduk miskin di Kabupaten Limapuluh Kota. Yaitu

dari jumlah 28,57 jiwa di tahun 2016 berkurang menjadi 26,93 jiwa di tahun 2017. Ini juga seiring dengan penambahan penduduk dari 372.568 tahun 2016 menjadi 376.072 tahun 2017. Meski jumlah penduduk miskin berkurang, indeks kemiskinan di daerah Kab 50 Kota masih tinggi. Yaitu masih diangka 1.09 % dari keseluruhan penduduk miskin yang ada.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Kabupaten/Regency</i>					
Kep Mentawai	12,58	13,16	13,09	12,95	12,99
Pesisir Selatan	35,02	38,13	35,86	35,53	34,92
Solok	34,48	36,42	34,06	33,33	32,89
Sijunjung	17,00	17,52	17,12	16,83	16,55
Tanah Data	18,22	20,05	19,53	19,27	18,48
Padang Pariaman	33,92	35,87	36,34	34,70	33,20
Agam	33,28	36,06	37,55	36,57	32,92
Lima Puluh Kota	27,42	28,76	28,57	26,93	26,47
Pasaman	20,33	21,88	20,83	20,38	20,31
Solok Selatan	11,56	11,95	11,91	11,89	11,85
Dharmasraya	15,22	15,89	16,24	15,63	15,42
Pasaman Barat	28,59	32,34	30,76	30,85	31,83
<i>Kota/Municipality</i>					
Padang	40,70	44,43	42,56	43,75	44,04
Solok	2,71	2,72	2,59	2,50	2,29
Sawahlunto	1,34	1,34	1,34	1,23	1,48
Padang Panjang	3,23	3,44	3,47	3,22	3,11

Bukittinggi	6,00	6,54	6,81	6,75	6,32
Payakumbuh	8,84	8,51	8,35	7,72	7,69
Pariaman	4,30	4,58	4,47	4,49	4,40

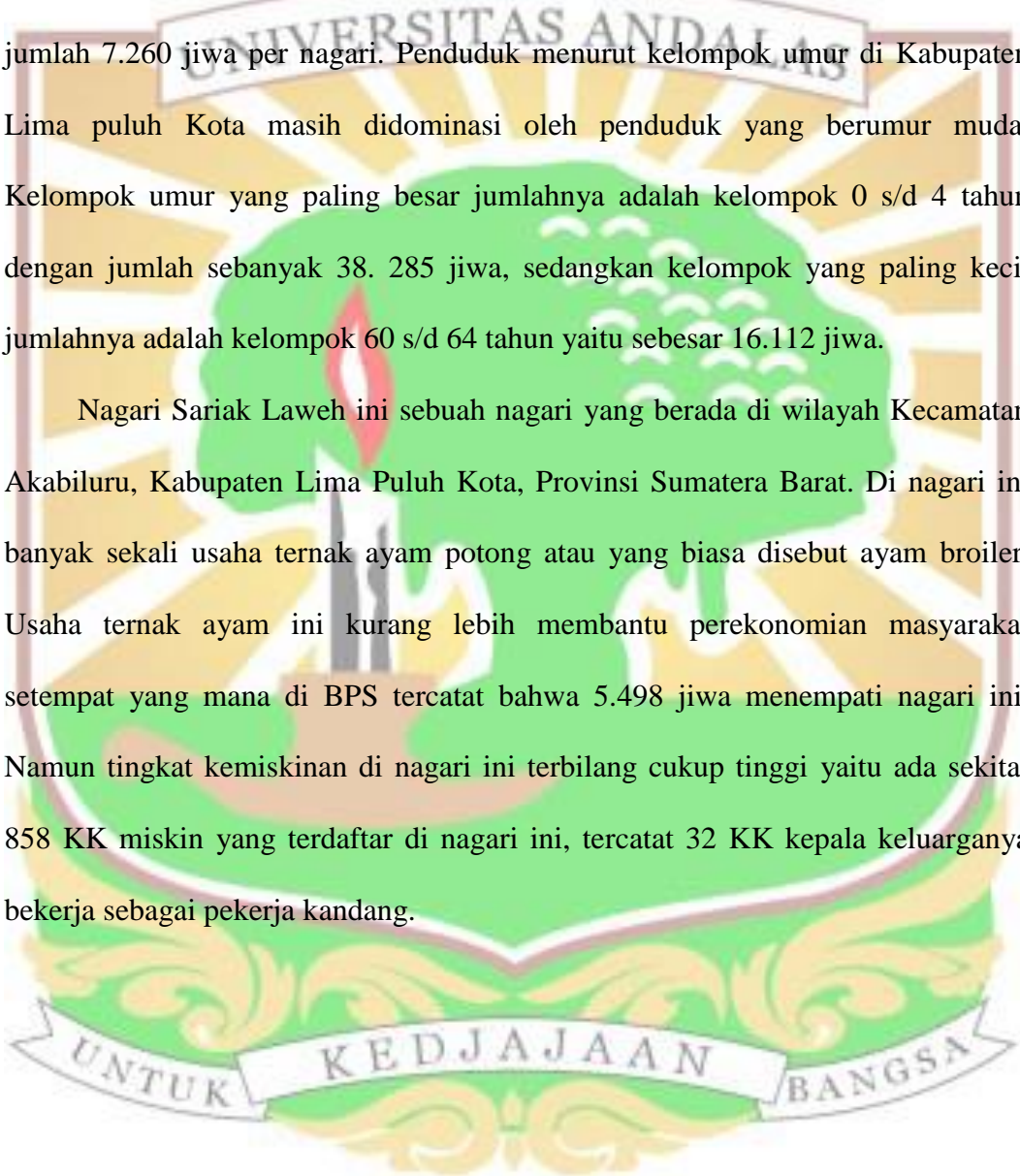
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019

Lingkungan mempengaruhi mata pencaharian penduduk disuatu daerah. Mata pencaharian penduduk disuatu daerah berbeda dengan daerah lain. Mata pencaharian penduduk didaerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk didaerah dataran rendah maupun didataran tinggi. Selain itu penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan penduduk di kota.

Peternakan merupakan salah satu mata pencaharian yang dekat dengan masyarakat pedesaan. Kegiatan dibidang peternakan dapat dibagi atas dua golongan, yaitu peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, kuda dan peternakan hewan kecil seperti ayam, ikan dan lain-lain. Pada bulan Maret 2020, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Sumatera Barat mencapai 344,23 ribu orang (6,28 persen), bertambah sebesar 1,14 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2019 yang sebesar 3,43,09 ribu orang (6,29 persen). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada bulan September 2019 sebesar 4,71 persen naik menjadi 4,97 persen pada Maret 2020. Sementara persentase penduduk miskin di daerah peesaan pada September 2019 sebesar 7,69 persen turun menjadi 7,43 persen pada Maret 2020. Jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2019 sebanyak 372. 568 jiwa, dengan rincian 184.995 jiwa penduduk laki-laki dan 187.573 jiwa penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 99 persen.

Kalau dilihat jumlah nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu sebanyak 79 nagari, maka dengan jumlah penduduk sebesar 372. 568 jiwa tersebut, rata-rata jumlah penduduk per nagari adalah sebesar 4.716 jiwa. Kecamatan yang paling tinggi penduduknya adalah Kecamatan Guguk dengan jumlah 7.260 jiwa per nagari. Penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Lima puluh Kota masih didominasi oleh penduduk yang berumur muda. Kelompok umur yang paling besar jumlahnya adalah kelompok 0 s/d 4 tahun dengan jumlah sebanyak 38. 285 jiwa, sedangkan kelompok yang paling kecil jumlahnya adalah kelompok 60 s/d 64 tahun yaitu sebesar 16.112 jiwa.

Nagari Sariak Laweh ini sebuah nagari yang berada di wilayah Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Di nagari ini banyak sekali usaha ternak ayam potong atau yang biasa disebut ayam broiler. Usaha ternak ayam ini kurang lebih membantu perekonomian masyarakat setempat yang mana di BPS tercatat bahwa 5.498 jiwa menempati nagari ini. Namun tingkat kemiskinan di nagari ini terbilang cukup tinggi yaitu ada sekitar 858 KK miskin yang terdaftar di nagari ini, tercatat 32 KK kepala keluarganya bekerja sebagai pekerja kandang.



Tabel 1.2
Jumlah Rumah Tangga Miskin di Nagari Sariak Laweh

NO	JORONG	JUMLAH (RUMAH TANGGA)
----	--------	-----------------------

1	Nagari Godang	133
2	Buruah Andoleh	102
3	Sawah Padang	64
4	Niau Kapalo Koto	115
5	Koto Baru	198
6	Koto Malintang	96
7	Simpang Tigo	150

Sumber: Kantor Wali Nagari Sariak Laweh 2019

Walaupun usaha peternakan ayam potong mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan karena tingginya permintaan masyarakat akan daging ayam yang berbanding lurus dengan perolehan keuntungan yang tinggi dan bisa menjadi sumber pendapatan bagi peternakan ayam potong tersebut. Namun faktanya di lapangan, banyak dari anak kandang tergolong ke dalam KK miskin. Setidaknya dari 32 anak kandang, 25 diantaranya masuk ke dalam KK miskin. Hal ini menjadi pertanyaan dikarenakan upah pekerja kandang yang tergolong besar dengan segala tunjangan serta keuntungan yang diberikan oleh pemilik usaha ayam.

Pada umumnya jumlah ayam yang dikelola oleh pekerja kandang mempengaruhi pendapatan mereka per 35-40 hari. Perolehan gaji yang didapatkan anak kandang dihitung dari per kilo daging ayam yang mana perkilonya di hargai sebesar 200 rupiah. Jika anak kandang mendapatkan 20 ton daging ayam maka mendapatkan upah 4 juta rupiah. Ditambah dengan adanya tunjangan kotoran ayam dan karungan makanan yang diterima penuh oleh pekerja kandang dan bantuan kebutuhan pokok berupa beras 40 kg, teh dan kopi yang ditanggung

oleh pemilik usaha ayam. Dengan ini bisa disimpulkan bahwa rata-rata pekerja kandang seharusnya sudah tergolong sejahtera dan berada di fase menengah. Hal ini menarik diteliti dikarenakan dengan pendapatan yang tergolong cukup besar, mayoritas pekerja kandang tetap berada dalam KK miskin.

Dalam mendirikan usaha ternak ayam potong ini kita harus mendirikannya jauh dari pemukiman warga karena mendirikan kandang ayam di pemukiman warga bisa mengganggu kestabilan dan kegiatan masyarakat dalam kesehariannya dan juga akan berdampak pada kondisi kesehatan masyarakat sekitar ketika kandang peternak sudah mulai dijalankan kegiatannya. Jika umur ayam itu sudah melebihi 20 hari maka hama ayam sudah mulai beterbangan sehingga bisa mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Tetapi masih ada juga pemilik kandang yang tidak memiliki standar kelayakan dalam mendirikan kandang ternak ayam potong. Contohnya saja seperti usaha ternak ayam potong di Nagari Sariaklaweh ini, usaha ternak ayam yang dekat dengan pemukiman menyebabkan keluhan warga sekitarnya seperti serangan lalat, dan juga bau yang mengganggu masyarakat yang ada di sekitar usaha peternak ayam potong. Kandang ternak ayam potong yang ada di Nagari Sariak Laweh ternyata pemilik usaha melakukan suatu cara agar masyarakat tidak merasa tertekan dengan dampak yang mereka rasakan dari usaha ternak ayam broiler yang dekat dengan pemukiman. Selain itu, juga ada beberapa masyarakat yang memanfaatkan adanya usaha ternak ayam potong itu untuk memperbaiki ekonominya. Tetapi ada juga beberapa kandang ayam yang letaknya di tengah kebun seperti di tengah kebun coklat dan jeruk

yang tujuannya agar masyarakat sekitar tidak merasa terganggu atau merasa tidak nyaman dengan adanya kandang ayam tersebut.

